



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERBUDAKAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FATHURRAHMAN**

**NIM. 1710211310069**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERBUDAKAN**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian  
dari syarat-syarat guna mencapai  
gelar sarjana hukum

Oleh :

**MUHAMMAD FATHURRAHMAN**

**NIM. 710211310069**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathurrahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310069  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 April 1999  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUDAKAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 April 2023  
Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Fathurrahman)  
NIM. 1710211310069

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERBUDAKAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FATHURRAHMAN**  
NIM. 1710211310069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal  
8 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.M.H.**  
NIP. 195804231986031001

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,  
M.Kn.**  
NIP. 197910022005011001

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIKAN  
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERBUDAKAN**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FATHURRAHMAN**

**NIM. 1710211310069**

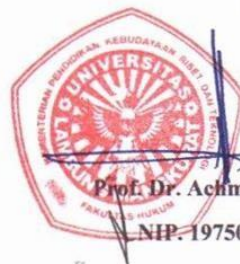
Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 519/UMB.I.II/Sp/2023

Tanggal : 31 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023  
dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Rahmida, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn  
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

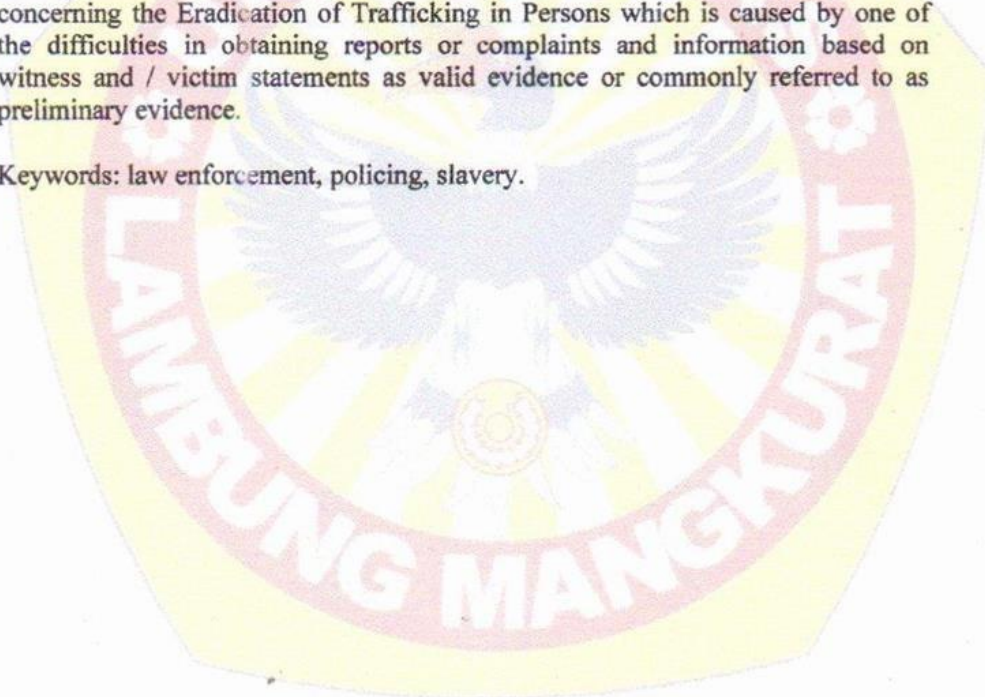
Nomor : 74 /UN.I.II/SP/2023

Tanggal : Juni 2023

## **ABSTRACT**

The purpose of this thesis research is to analyze laws and regulations in terms of regulations for the eradication of slavery by the police and to determine the obstacles of police investigators in enforcing slavery crimes. This research is a normative legal research, by taking inventory of laws and regulations regarding slavery in Indonesia. According to the results of this thesis research shows that: First, law enforcement carried out by police investigators in handling slavery crimes is through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. In the investigation process to find out who the suspect is, investigators must collect at least 2 (two) valid evidence from 5 (five) valid evidence based on the Criminal Procedure Code and in the regulations in the Law on the Eradication of Trafficking in Persons becomes a differentiator in investigations because it contains valid evidence other than the provisions of the Criminal Procedure Code and the receipt of the testimony of one witness who actually contradicts the Criminal Procedure Code, namely one witness not a witness. Second, the obstacles of police investigators in law enforcement of slavery crimes are in fulfilling the elements of offense in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons which is caused by one of the difficulties in obtaining reports or complaints and information based on witness and / victim statements as valid evidence or commonly referred to as preliminary evidence.

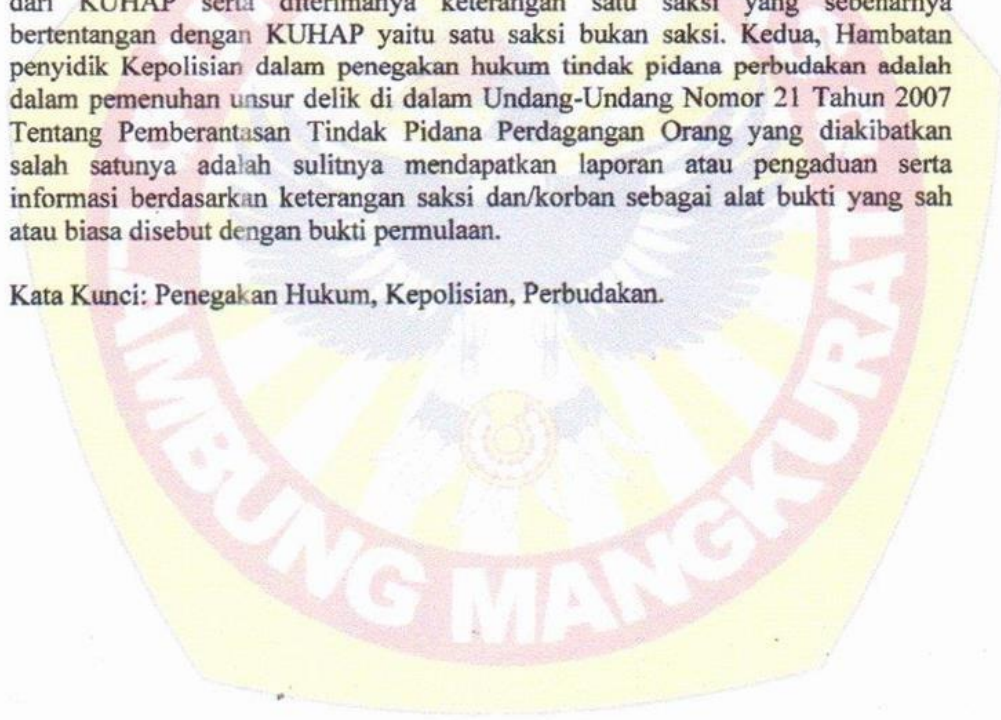
Keywords: law enforcement, policing, slavery.



## RINGKASAN

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal pengaturan terhadap pemberantasan tindak pidana perbudakan oleh kepolisian dan untuk mengetahui hambatan penyidik kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perbudakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan mengenai perbudakan di Indonesia. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Penegakan hukum yang dilakukan penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana perbudakan adalah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam proses penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya penyidik harus mengumpulkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dari 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan dalam pengaturan di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pembeda dalam penyidikan karena memuat alat bukti yang sah selain ketentuan dari KUHAP serta diterimanya keterangan satu saksi yang sebenarnya bertentangan dengan KUHAP yaitu satu saksi bukan saksi. Kedua, Hambatan penyidik Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perbudakan adalah dalam pemenuhan unsur delik di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diakibatkan salah satunya adalah sulitnya mendapatkan laporan atau pengaduan serta informasi berdasarkan keterangan saksi dan/korban sebagai alat bukti yang sah atau biasa disebut dengan bukti permulaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Perbudakan.





## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perbudakan” Tidak lupa pula shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Jurusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Achmad Ratomi, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik
4. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H dan Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing Ketua dan pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan semangat kepada peneliti.
10. Teman-Teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritas yang diberikan selama dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan selama ini.

Banjarmasin, 15 Maret 2023

Penulis



Muhammad Fathurrahman

NIM 1701211310069

## DAFTAR ISI

Hlm

### DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian. ....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan. ....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Landasan Teoritis dan Yuridis Penegakan Hukum.....	16
B. Sejarah dan Pengertian Perbudakan .....	19
C. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. penegakan hukum yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana perbudakan .....	29
B. hambatan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perbudakan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	

